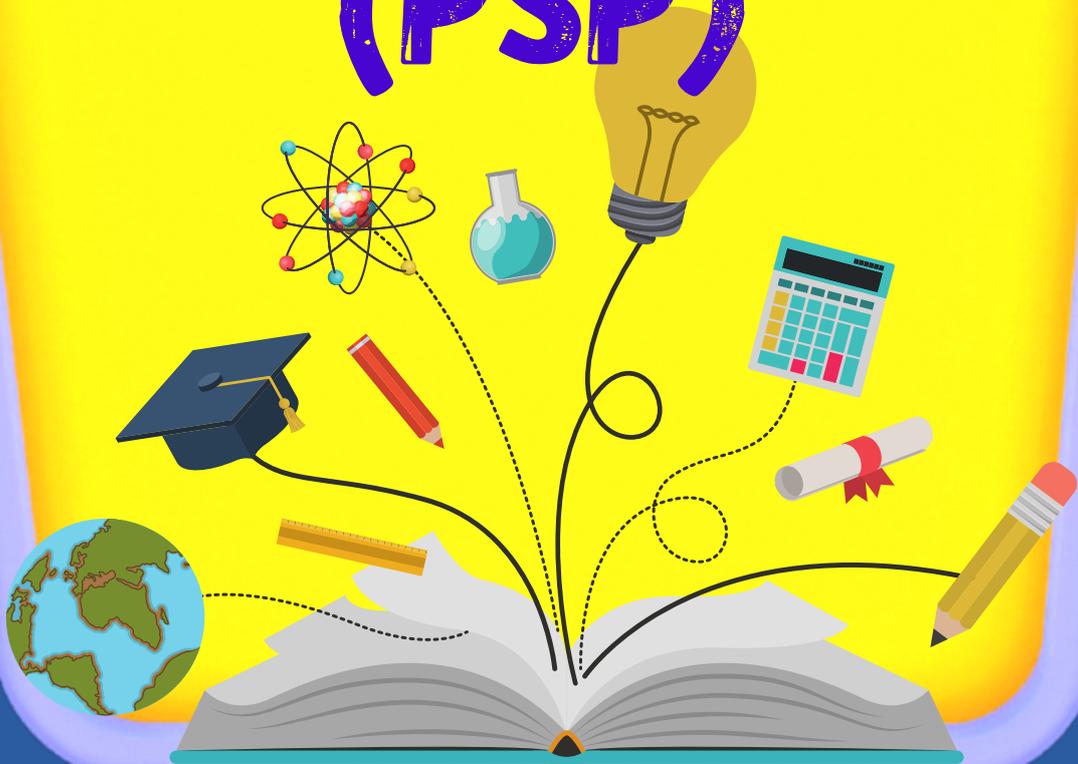




PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP)



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia



mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia



Berkebinekaan Global



Mandiri



Pelajar Pancasila



Bergotong Royong

Bernalar Kritis



Kreatif



TERDAPAT 4 KELOMPOK SEKOLAH INDONESIA BERDASARKAN TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI



PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK AKAN MENGAKSELERASI SEKOLAH UNTUK BERGERAK 1-2 TAHAP LEBIH MAJU DALAM WAKTU 3 TAHUN AJARAN

Program Sekolah Penggerak

Kolaborasi Kemdikbud dan Pemerintah Daerah diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, SLB baik negeri maupun swasta

Kondisi awal sekolah

Tahap 1 atau Tahap 2 atau Tahap 3 atau Tahap 4

Durasi program

Tiga tahun ajaran



PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TERDIRI DARI LIMA INTERVENSI YANG SALING TERKAIT DAN TIDAK BISA DIPISAHKAN

Penguatan SDM Sekolah

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (pelatihan secara individual) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.

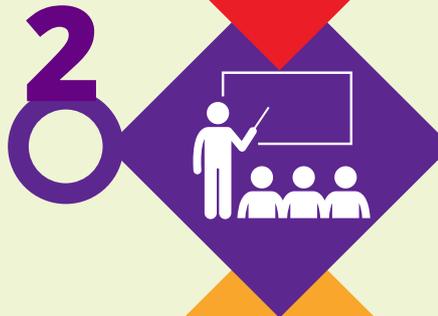
Perencanaan berbasis data

Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan



Pendampingan konsultatif dan asimetris

Program kemitraan antara **Kemendikbud dan pemerintah daerah** dimana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak



Pembelajaran kompetensi holistik

Pembelajaran yang berorientasi pada **penguatan kompetensi dan pengembangan karakter** yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas.



Digitalisasi sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan



1

PENDAMPINGAN KONSULTATIF DAN ASIMETRIS



Program kemitraan antara **Kemendikbud dan Pemerintah Daerah** dimana **Kemendikbud** memberikan **pendampingan implementasi Sekolah Penggerak**



Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan **pendampingan Pemerintah Daerah selama implementasi Sekolah Penggerak** seperti fasilitasi Pemerintah Daerah dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi



2

PENGUATAN SDM SEKOLAH

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (pelatihan secara individual) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.

Pelatihan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru



1. Pelatihan implementasi pembelajaran kompetensi holistik bagi kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru
2. Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, penilik

*Dilakukan 1 kali/tahun selama program.
Latihan nasional untuk perwakilan guru.
Sementara guru lain dilatih oleh in-house training*

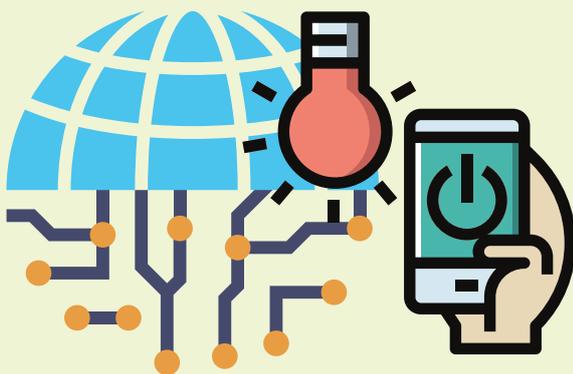
Pendampingan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru



1. Pelatihan di sekolah
2. Lokakarya tingkat Kabupaten/Kota
3. Komunitas Belajar /Praktisi (Kelompok Mapel)
4. Program Coaching
 - 1-on-1 dengan kepala sekolah
 - Bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru

Dilakukan secara berkala 2-4 minggu sekali selama program

Implementasi Teknologi



1. Literasi Teknologi
2. Platform Guru : Profil dan Pengembangan Kompetensi
3. Platform Guru : Pembelajaran
4. Platform Sumber Daya Sekolah
5. Platform Rapor Pendidikan

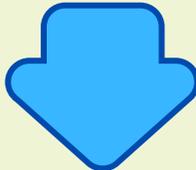
1 pelatih ahli untuk 7-10 kepala sekolah. Pelatih ahli akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok

3

PEMBELAJARAN KOMPETENSI HOLISTIK



Dipelajari melalui



Program Intrakurikuler

- Pembelajaran terdiferensiasi
- Capaian pembelajaran disederhanakan
- Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi
- Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan

Program Kokurikuler

- Lintas mata pelajaran
- Berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum
- Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas
- Melibatkan masyarakat
- Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global

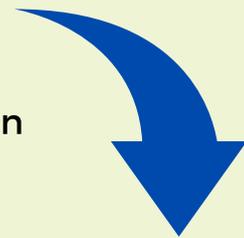
4

PERENCANAAN BERBASIS DATA

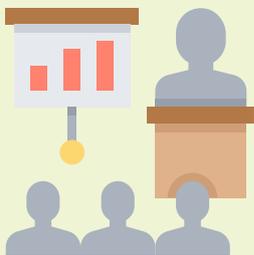
Manajemen berbasis sekolah:
perencanaan berdasarkan **refleksi diri**
satuan pendidikan



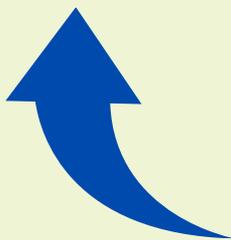
Laporan*
potret kondisi mutu pendidikan



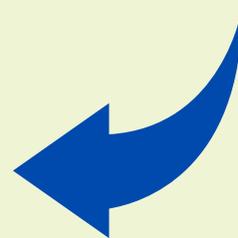
Bahan untuk refleksi



Pendampingan oleh
Unit Pelaksana Teknis
dan atau pelatih ahli



Perencanaan
program perbaikan



* dikumpulkan dari berbagai sumber data

5

DIGITALISASI SEKOLAH

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan



Platform Guru: Profil dan Pengembangan Kompetensi

Alat bantu Guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis microlearning dan habituasi



Platform Guru: Pembelajaran

Alat bantu Guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi



Platform Sumber Daya Sekolah

Meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah



Dashboard Rapor Pendidikan

Memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan

SIAPA SAJA YANG BERPERAN DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK?

Pelatih Ahli, Pengawas dan Penilik

- Pelatih ahli melakukan pendampingan Kepala Sekolah
- Pengawas mendapatkan pelatihan dan pendampingan



Pemerintah Daerah

Kepala Sekolah

- Berkolaborasi dalam Community of Practice dengan Kepala Sekolah Penggerak lain
- Kepala Sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan Kepemimpinan Pembelajaran



Platform Teknologi
Sebagai penunjang

Komite Pembelajaran Guru

- Dipilih oleh Kepala Sekolah untuk membantu Pembelajaran Guru
- Menjadi fasilitator pembelajaran Guru



Komite Orang Tua
Pemangku kepentingan

Guru

- Akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru
- Menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif



Murid

- Akan menggunakan pembelajaran
- Pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi
 - Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum



Mitra

Perguruan tinggi, industri, lembaga sosial, kepala desa, pemimpin, dsb.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI TAHUN 2021, DI 34 PROVINSI DAN 110 KABUPATEN/KOTA



PAUD

316



SD

1.089



SMP

546



SMA

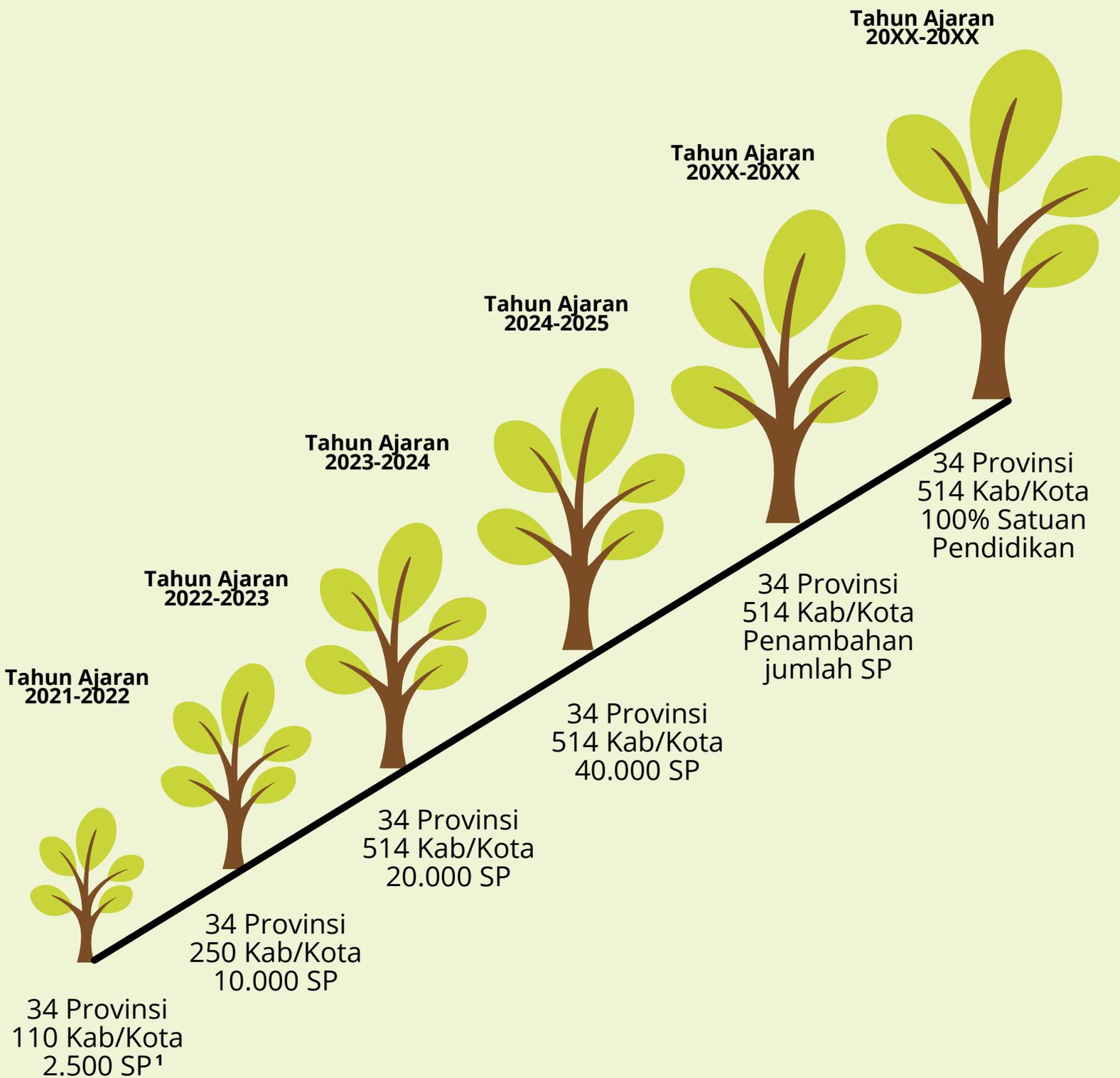
374

SLB



175

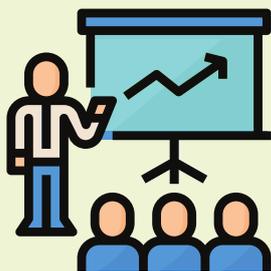
SEKOLAH PENGGERAK ADALAH BAGIAN DARI EKOSISTEM PENDIDIKAN, DALAM JANGKA PANJANG SEMUA SEKOLAH AKAN MENJADI SEKOLAH PENGGERAK



¹ PAUD 316, SD 1089, SMP 546, SMA 374, SLB 175



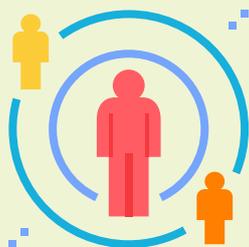
MANFAAT UNTUK PEMERINTAH DAERAH



Meningkatkan kompetensi SDM Satuan Pendidikan



Membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan



Efek multiplier dari Sekolah Penggerak ke Sekolah lainnya



Mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah

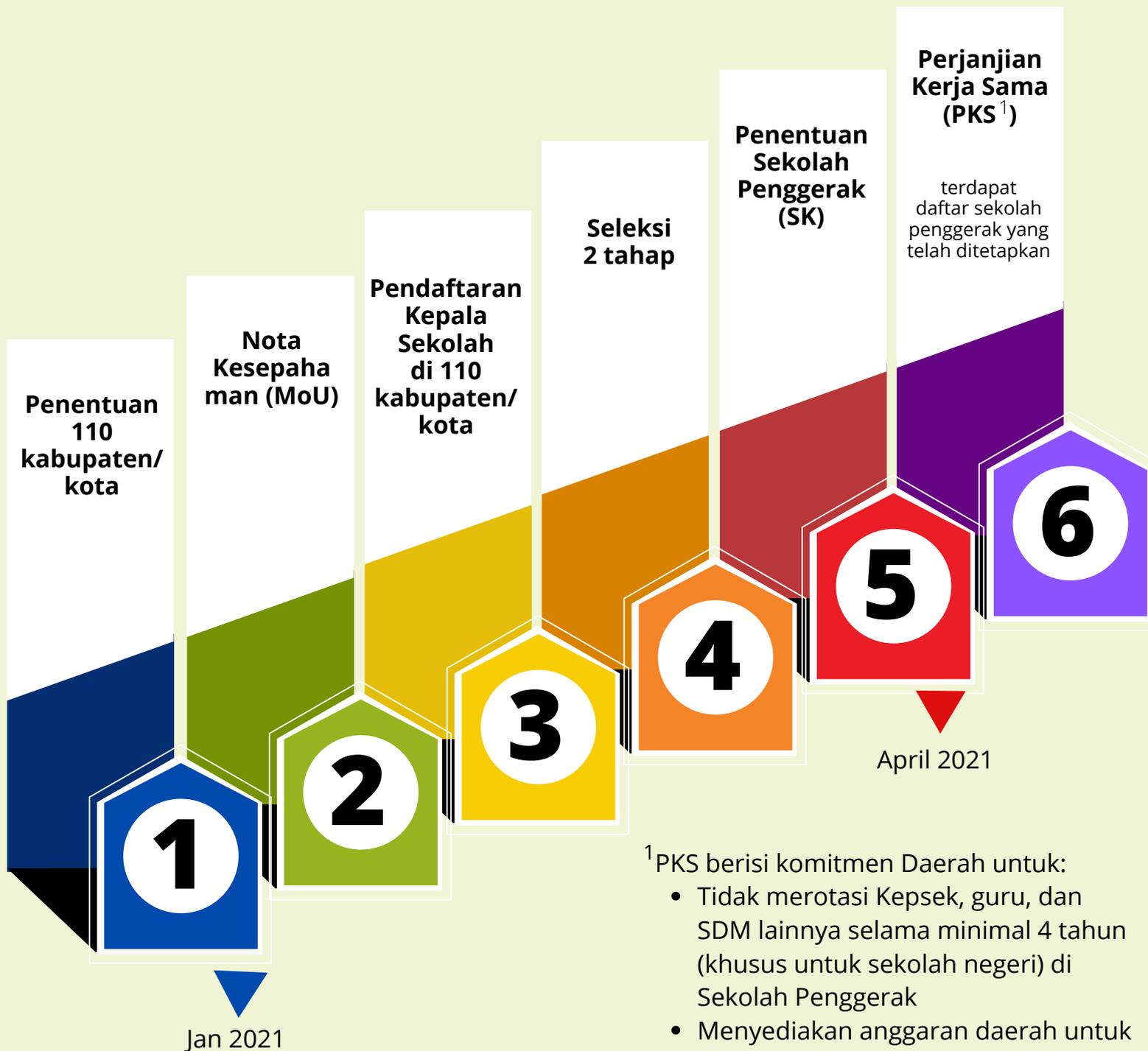


Peluang mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Penggerak Pendidikan



Menjadi daerah rujukan praktek baik dalam pengembangan sekolah penggerak

PROSES PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



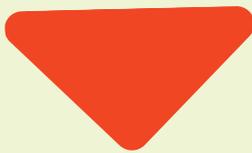
¹PKS berisi komitmen Daerah untuk:

- Tidak merotasi Kepsek, guru, dan SDM lainnya selama minimal 4 tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak
- Menyediakan anggaran daerah untuk melakukan intervensi Sekolah Penggerak
- Membuat kebijakan daerah untuk mendukung program Sekolah Penggerak

PERTIMBANGAN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



297
Kabupaten/Kota



110
Kabupaten/Kota
Program Sekolah Penggerak

Pertimbangan

1. Tingkat komitmen daerah berdasarkan:

- Kesanggupan menyediakan anggaran untuk Program Sekolah Penggerak
- Kesanggupan menerbitkan kebijakan/program yang mendukung Program Sekolah Penggerak seperti tidak merotasi Kepala Sekolah dan Guru selama 4 tahun

2. Keterwakilan daerah

- Kondisi mutu pendidikan
- Kondisi geografis (Daerah 3T dan Daerah Khusus)



www.kemdikbud.go.id

